

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Lamandau Tahun 2016.**

Data hasil penelitian oleh penulis diperoleh dari lapangan melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan Narasumber guna mendapatkan keterangan secara langsung mengenai topik penelitian. Peneliti memfokuskan pada Evaluasi, yang menggunakan Model CIPP. Evaluasi hanya pada pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap Pendidikan yang ada di Kabupaten Lamandau. Berikut 3 indikator yang akan menjadi fokus pembahasan.

#### **3.1 Evaluasi Konteks.**

Seperti yang ada pada bab I yang dimaksudkan Evaluasi yaitu upaya menjabarkan kesejahteraan dan jaminan sosial dalam ruang lingkup pelaksanaan PKH di Kabupaten Lamandau Jaminan Sosial.

##### **a. Kesejahteraan.**

Kesejahteraan dapat dilihat dari keadaan suatu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan primer dan hidup dengan layak. Pemerintah pusat memiliki beberapa program untuk membantu keluarga yang tidak sejahtera, bantuan tersebut salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan PKH seharusnya berdampak pada kesejahteraan, setiap tahun dana yang diberikan terus meningkat. Fakta lapangan di Kecamatan Delang dan Bulik Timur, Kesejahteraan tidak mengalami peningkatan secara drastis pada tahun 2015. Peneliti mendapatkan data monitoring mingguan dari pembimbing PKH Kecamatan Delang dan Bulik timur sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pemanfaatan Dana PKH

NO	Keluarga Penerima Manfaat	Tanggal	Lokasi	Keterangan
1	Y (inisial)	17 oktober 2016	Kecamatan Delang	Dana PKH digunakan untuk membayar Hutang.
2	Ibu Sri	17 Oktober 2016	Kecamatan Delang	Dana PKH di gunakan untuk membeli handphone
3	Ibu tya	17 Oktober 2016	Kecamatan Delang	Dana PKH di gunakan untuk berlibur bersama keluarga.
4	M (Insial)	16 Oktober 2016	Kecamatan Bulik Timur	Dana PKH digunakan untuk membeli Pupuk tanaman sawit.
5	U (inisial)	15 Oktober 2016	Kecamatan Bulik Timur	Dana PKH di gunakan untuk membayar Hutang.
6	Ibu Yeksa	14 Oktober 2016	Kecamatan Bulik Timur	Dana PKH digunakan untuk mnghutangi tetangga.

*Sumber pembimbing PKH Kec Delang 2017*

Pada tabel yang berupa Monitoring yang di lakukan pembimbing di Kecamatan Delang dan Bulik Timur ada 6 KPM yang menggunakan bantuan PKH yang diberikan tidak sesuai ketentuan. Namun, penyalah manfaat dana bantuan PKH tersebut bukan pada sektor pendidikan melainkan bantuan umum seperti Ibu hamil/ Nifas, Janda, Lansia dan Ibu menyusui. Peneliti tidak mendapatkan fakta bahwa ada penyalahgunaan pada bidang Pendidikan.

Saat di lakukan Konfirmasi dalam penggunaan dana PKH kepada bapak taufik selaku Kepala Bidang Sosial Kabupaten Lamandau, pada tanggal 16 januari 2018 beliau mengatalan bahwasanya :

*“begini mas, banyak masyarakat yang gak paham dengan penggunaan sebenarnya dari bantuan PKH, apalagi yang ada di daerah yang lumayan pedalaman mas. Pendamping sudah berusaha mengarahkan namun tetap tidak bisa di pahami, kami di daerah hanya bisa bersabar dan terus berusaha.”*

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah daerah selaku kordinator pembimbing setiap kecamatan sudah mengarahkan mengenai pemanfaatan PKH. Namun kendala dilapangan masyarakat belum bisa memahami untuk pemanfaatan bantuan. Peneliti juga menayakan keefektifan PKH kepada pembimbing kecamatan delang yaitu mas aji yang diwawancari pada tanggal 20 januari 2018 mengatakan bahwa :

*“PKH di kecamatn delang itu mas banyak yang tidak tepat sasaran, apalagi pada bidang pendidikan banyak melesetnya. Data penerima PKH yang di dapat dari pusat gak sesuai lapangan mas. Masa ada anak yang harusnya dapat toh malah gak dapat. Malah yang gak dapat jadi dapat yah saya coret supaya tepat sasaran”.*

Pernyataan tersebut memberi penjelasan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah pusat ada beberapa yang tidak tepat sasaran. namun bukan berarti semuanya tidak tepat sasaran ada juga yang sesuai tepat sasaran. Sehingga pada Evaluasi konteks poin kesejahteraan ini masih dirasa belum tercapai karena faktor pemanfaatan tidak maksimal, dan data yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai fakta dilapangan. Ini sesuai dengan pernyataan Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Lamandau yang mengatakan bahwasanya :

*“Program PKH ini sejujurnya sudah bagus sekali mas. Cuma kendala kami yang di daerah adalah tidak dapat menambah penerima PKH, hanya bisa mengurangi. Jadi gimana mau membantu agar lebih sejahtera mas. Tapi di balik itu banyak keluarga yang terbantu dengan PKH mas”.*

Pada bidang Pendidikan yang terlihat mencolok sekali adalah meningkatnya angka partisipasi murni menurut jenjang Pendidikan.

Tabel 3.2

Angka Partisipasi Murni Pendidikan.

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>APM</b>	<b>APM</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
SD/MI	93	100
SMP/MTs	82.78	85.65
SMA/MA	46.38	48.33

*Data di dapat dari Dinas Pendidikan Kab Lamandau 2016*

Pada data tersebut menjelaskan bahwa pada ketiga jenjang pendidikan mengalami peningkayan angka partisipasi murni. Pada jenjang SD/MI tahun 2015 diangka 93 dan pada tahun 2016 menjadi 100, pada jenjang SMP dan MTs tahun 2015 82,78 dan tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 85,65, pada jenjang SMA/ MA tahun 2015 diangka 46,38 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 48,33. Pengkatan pada angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

**b. Jaminan sosial.**

Peneliti memfokuskan jaminan sosial pada perkembangan dan perbaikan di pendidikan melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Kabupaten lamandau merupakan salah satu kabupaten yang memberikan fasilitas berupa pendidikan gratis untuk SD-SMA, tetapi bukan berarti dari keseluruhan gratis. Murid hanya dibebankan biaya baju sekolah dan perlengkapan sekolah serta buku LKS. Hal ini di ketahui dari hasil wawancara dengan Kepala bidang (Kabid) pengembangan pendidikan di Dinas Pendidikan pada tanggal 29 januari 2018 yang mengatakan bahwasanya :

*“betul pendidikan di lamandau itu gratis mas, tidak ada bayar spp atau iuran sekolah. Murid hanya di suruh membeli seragam sekolah mas. Harga seragam sekolah juga di atur oleh dinas (dinas Dikjar) mas. APBD selalu kami anggarankan buat operasional dan pemenuhan fasilitas sekolah, jadi gak ada alasan buat guru untuk narik iuran uang siswa mas.”*

Pernyataan tersebut sudah memberi penjelasan bahwa semua orang bisa mendapatkan pendidikan secara gratis, tanpa memikirkan biaya yang tidak wajar. Namun, mengapa masih ada anak-anak yang tidak ingin pergi sekolah. Peneliti mewawancari keluarga ibu Yuni pada tanggal 29 januari 2018 yang mengatakan bahwasanya :

*“anak saya gak mau pergi kesekolah mas karna dia pikir mending bantu orang tua aja. Padahal saya dan suami saya sempat memaksakan dia untuk kesekolah. Katanya alasanya itu jarak dari rumah kesekolah itu jauh dan dia minta kos, saya gak sanggup bayarnya.”*

Itu pernyataan ibu Yuni yang sebenarnya sudah mendukung untuk anak pergi sekolah. Namun anak tersebut memikirkan keadaan ekonomi orang tuanya. Hal tersebut akan berubah setelah keluarga ibu Yuni mendapatkan bantuan PKH bidang pendikan. Bantuan yang diberikan

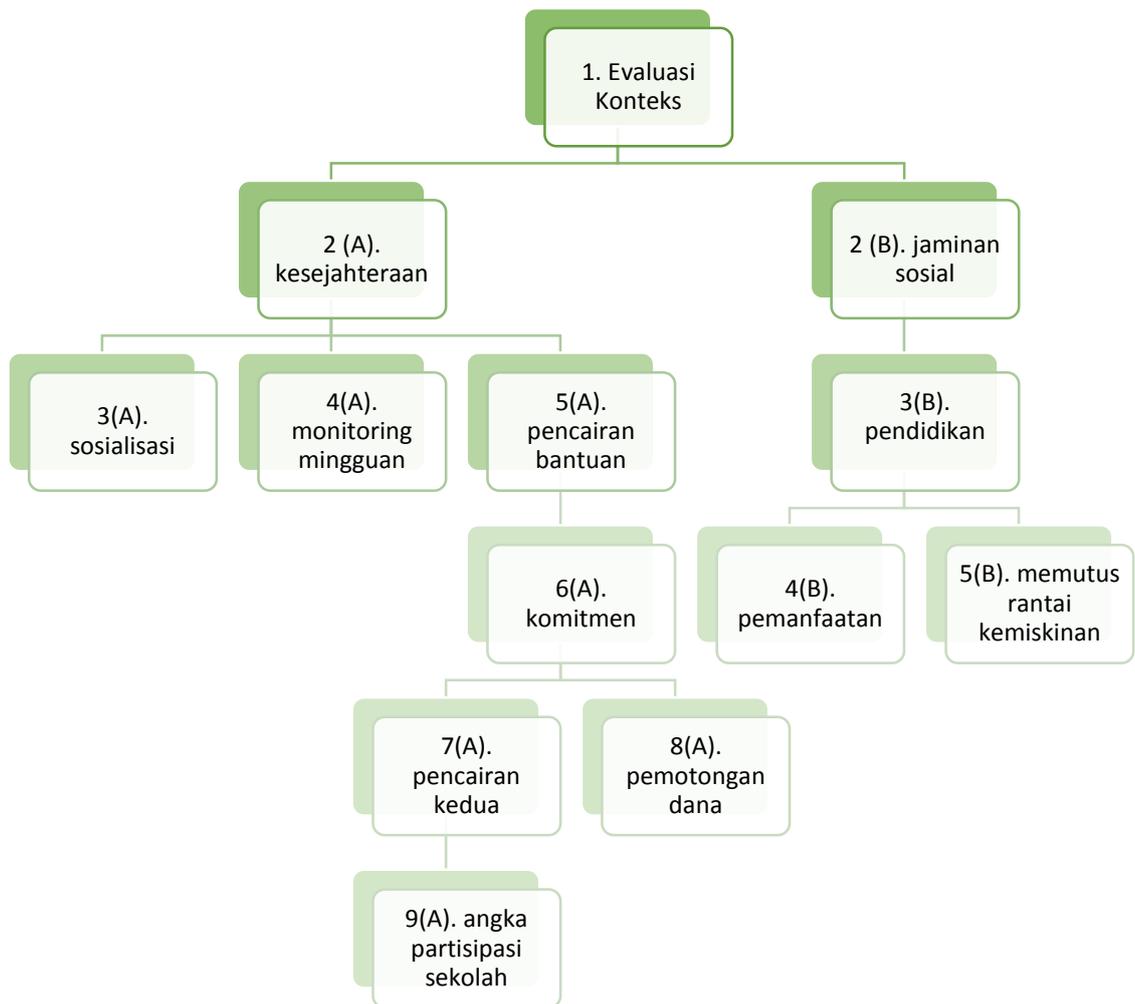
untuk membayar Kos anaknya didekat sekolah. Ibu Yuni mendapatkan bantuan PKH pada tahun 2016 sebesar 1.830.000 rupiah, yang digunakan semua pada keperluan pendidikan anaknya. Ada juga pernyataan dari Ibu Tya yang sekarang sudah bisa mendukung anaknya untuk sekolah setelah mendapatkan bantuan PKH, berikut pernyataan Ibu Tya :

*“semoga tahun depan saya dapat bantuan PKH lagi mas, jadi saya bisa menyekolahkan anak saya di SMAN 1 Delang. Bantuannya bisa bantu beli buku dan seragam sekolah.”*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Ibu Tya sangat memerlukan bantuan PKH pendidikan buat anaknya. Jaminan sosial dalam hal pelaksanaan bidang pendidikan di Kabupaten Lamandau sudah sesuai hal ini terlihat dari pernyataan ibu Tya dan Yuni yang sekarang sudah bisa menyekolahkan anaknya. Pemerintah dirasa sudah sesuai dalam penentuan sasaran penerima berupa keluarga tidak mampu, namun memfokuskannya pada bidang pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan.

Peneliti membuat bagan analisis yang bertujuan untuk menyimpulkan pembahasan mengenai evaluasi Konteks.

### Bagan 3.1 Evaluasi Konteks



Berikut cara membaca bagan diatas, Evaluasi Konteks (1) dibagi menjadi 2 poin utama yaitu kesejahteraan (2A) dan Jaminan Pendidikan (2B). Pada poin kesejahteraan(2A) pertama dilakukan sosialisai (3A) (bersamaan verifikasi) mengenai tujuan Pelaksanaan PKH. setelah sosialisasi dilakukan, tahap selanjutnya yaitu pencairan pertama (5A) dan dilakukannya sosialisasi Mingguan. Pada tahap saat setelah pencairan pertama, dilakukanya komitmen (6A) kepada KPM dengan tujuan menentukan pencairan kedua (7A) atau bahkan pemotongan dana atau bisa penghapusan penerima bantuan (jika melanggar ketentuan PKH. sehingga, output dari poin kesejahteraan adalah Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lamandau.

Pada poin jaminan sosial, memfokuskan pada bidang Pendidikan (3B) , ini dilihat dari bentuk pemanfaatan dana PKH yang telah diberikan. Sehingga, memiliki Output sesuai tujuan pelaksanaan PKH yaitu Memutus rantai Kemiskinan (5B).

### **3.2 Evaluasi Input.**

Tahap kedua dari Model CIPP ini adalah Evaluasi masukan (input). Pada tahap ini peneliti menemukan jumlah data peserta penerima bantuan PKH yang menjadi RTSM, data tersebut dapat dilihat pada bab II. Dari jumlah penduduk miskin 33.712 di Kabupaten Lamandau yang mendapatkan bantuan PKH sebanyak 538 KK dan yang mendapatkan bantuan PKH pendidikan hanya 36 KK. Peneliti memfokuskan pada aspek input pemberian bantuan dan bimbingan pendidikan.

#### **a. Pemberian Bantuan**

PKH di Kabupaten Lamandau belum sepenuhnya berjalan baik, ini dapat dilihat melalui pelaksanaan PKH yang hanya di 3 Kecamatan. Kecamatan tersebut melainkan hanya Kecamatan Delang, Lamandau, dan Bulik Timur. Berikut adalah kutipan hasil wawancara dari pembimbing PKH lapangan di Delang, Bulik Timur dan Lamandau dalam hal pemberian bantuan.

*“Data yang di berikan pusat banyak yang meleset mas, seperti tahun 2015 delang mendapat 102 KPM ternyata setelah diverifikasi dilapangan hanya 87 KPM yang sesuai dengan ketentuan dapat dana PKH.”*

*“Di Bulik Timur kendalanya sama kayak di Delang mas, tapi kendala jarak juga mas, karena 1 kecamatan disini luas banget.*

*Dan banyak protes dari warga yang jadwal pencairan bantuan tidak tepat waktu.”*

*“Kecamatan Lamandau aman mas, Cuma data aja yang meleset jauh, banyak yang harusnya dapat tapi tidak ada namanya didaftar KPM. Paling kendala utamanya itu ada protes warga yang harusnya mendapat PKH malah tidak mendapat PKH itu aja mas.”*

Kutipan wawancara 3 Pembimbing lapangan memiliki masukan kepada Pemerintah pusat dalam menentukan nama penerima KPM. Peneliti juga mendapatkan masukan dari Keluarga Penerima Manfaat yaitu Ibu tiya dan ibu Yuni yang mengatakan bahwa, berikut kutipan hasil wawancara :

*“harusnya pencairan dana nya dijadwalkan sesuai dan tepat waktu mas, karena untuk pendidikan susah di tunda, contoh beli LKS harus di awal semester, kalo cairnya dana PKH di akhir untuk apa, SKS sudah gak dipake, dan kalo bisa di ditambahi jumlahnya mas hehehe”*

*“saya kan dapat bantuan nya pake kartu mas, saya masih belum paham makenya gimana, kalo untuk keluarga kayak saya yang gak ngerti kartu-kartu gitu mending langsung bantuannya uang atau keperluan sekolah mas. Jadi saya gak bingung jarak dari sini ke kota jauh sekali.”*

Kutipan tersebut memberi masukan dalam pelaksanaan PKH dari ketepatan waktu dan kemudahan dalam mengakses bantuan bagi penerima yang tidak mengerti. Peneliti memklasifikasikan masukan yang diberikan oleh pembimbing lapangan dan juga keluarga Penerima Manfaat.

Tabel 3.3

Kesimpulan Masukan.

No	Masukan	Solusi (sementara). Data
1	Data KPM yang tidak sesuai setelah dilakukan verifikasi. data tersebut di tentukan oleh	Peneliti merekomendasikan dalam menentukan KPM, pemerintah pusat dapat rekomendasi dari daerah,

	pemerintah pusat, daerah hanya melakukan verifikasi dan validasi.	walaupun akhirnya penerima KPM ditentukan pusat. setidaknya daerah bisa merekomendasikan KPM yang menerima bantaun.
2	Lokasi yang dilakukan verifikasi sangat luas, contohnya Kecamatan Bulik Timur.	Paling tidak ada 2 pembimbing lapangan, atau dapat disesuaikan dengan lokasi Kecamatan tersebut.
3	Pencairan bantuan PKH tidak tepat waktu, sehingga pemanfaatan pada Pendidikan tidak secara maksimal. Contohnya dalam membeli SKS harusnya diawal semester atau kelas. Karena pencairan terlambat jadi pembelian LKS dengan percuma.	Harus ada pemantangan jadwal dalam pelaksanaan Program PKH. tahun 2015 tidak ada keterlambatan, namun pada tahun 2016 ada keterlambatan. Harusnya dicairkan 4 tahap. Malah dijadikan 1 tahap (langsung semua).
4	Jumlah bantuan yang diberikan harus disesuaikan dengan lokasi pelaksanaan Program dilihat dari harga pokok daerah tersebut.	Mengkaji ulang jumlah bantuan PKH untuk daerah-daerah yang jauh dari sektor ekonomi. Sehingga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijak.

*Inti dari percakapan bersama kordinator Kecamatan 2017.*

## **b. Bimbingan Pendidikan**

Bimbingan pendidikan merupakan salah satu tugas yang seharusnya tidak diwajibkan pada pembimbing PKH lapangan. Namun, fakta dilapangan khususnya di Kecamatan Lamandau memiliki pola pikir yang belum mengutamakan pendidikan. Hal ini dikarenakan pola didikan anak oleh keluarga yang masih kental akan budaya lebih mengutamakan kepentingan suku dari pada pendidikan. Hal ini diketahui peneliti dari hasil wawancara terhadap salah satu keluarga yang menjadi pengurus suku, bapa johan diwawancarai pada tanggal 31 januari 2018 yang mengatakan :

*“kami sudah terbiasa hidup dengan alam, dan tujuan kami menjaga alam. Pendidikan yang kami dapat dari pengalaman kami. Saya punya anak 4. Anak-anak tersebut dari kecil (10/12 tahun) sudah saya biasakan mandiri. Saya berikan contoh mereka melakukan itu pelajaran yang saja ajarkan. Karena orang tua saya dulu seperti itu.”*

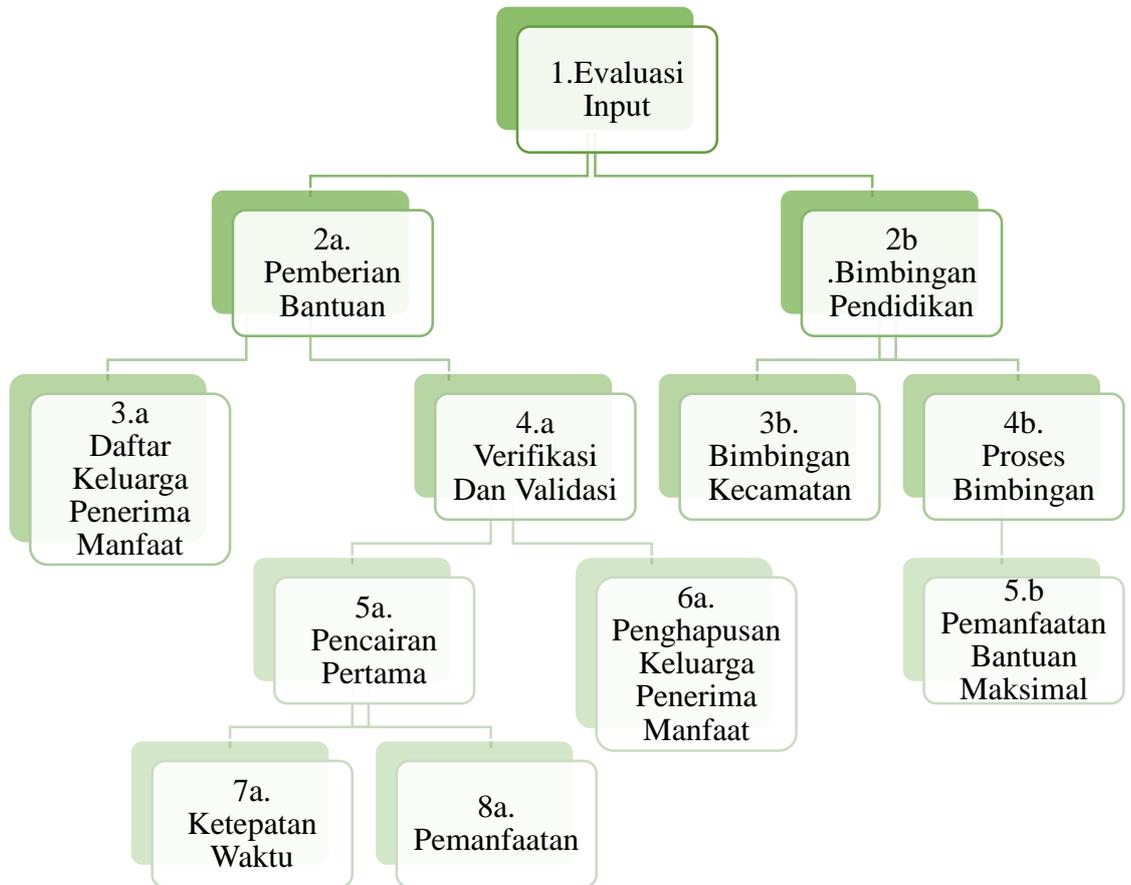
Dari pernyataan tersebut jelas bahwa peningkatan pendidikan bagi anak-anak pedalaman menjadi kendala. Prilaku anak yang tidak pernah bersosialisasi di Sekolah akan sangat pemalu. Terbukti ada beberapa anak yang harusnya umurnya sudah setara SLTA namun masih seperti anak SD. Hal ini menjadi salah satu tugas pembimbing dalam melakukan pendekatan kepada anak untuk memberikan pemahaman bahwa sekolah itu penting. Berikut kutipan wawancara dengan pembimbing lapangan Kecamatan Lamandau:

*“bimbingan saya lakukan 2 kali seminggu mas, biasanya anak yang menerima bantuan PKH saya kumpulkan dibalai desa untuk bercerita sambil bermain. Tujuan saya itu mas buat merka jadi Percaya diri jadinya mereka yang nerima bantuan PKH bisa benar pergi kesekolah.”*

Pada awalnya anak-anak yang menerima bantuan PKH tidak ingin kesekolah lagi karena mereka malu sudah lama putus sekolah, tidak punya perlengkapan sekolah, dan tidak bisa mengikuti pelajaran (tertinggal). Hal ini merupakan Pekerjaan Rumah pembimbing lapangan Kec Lamandau bagaimana mereka menerima bantuan tetapi tidak ingin sekolah. Sehingga solusi yang dilakukan pembimbing lapangan adalah melakukan bimbingan untuk anak tersebut agar dapat kembali percaya diri untuk pergi kesekolah.

Peneliti membuat bagan analisis yang bertujuan untuk menyimpulkan pembahasan mengenai Evaluasi Input.

Bagan 3.2 Evaluasi Input



Berikut cara membaca Pada bagan Evaluasi Input, memiliki 2 poin utama yaitu Pemberian Bantuan (2a), dan Bimbingan Pendidikan (2b). Pada poin pemberian bantuan, daftar nama calon Keluarga Penerima Manfaat (3a) dari Kementerian Sosial dilakukan Verifikasi dan validasi (4a) oleh Daerah (Kabupaten). Setelah di lakukan verifikasi akan ada pencairan pertama(5a) terhadap yang memenuhi ketentuan mendapatkan bantuan PKH, sedangkan yang tidak memenuhi akan ada penghapusan (6a) (tidak mendapatkan bantuan PKH). pada proses pencairan pertama akan ada dua hal yaitu ketepatan waktu (7a) pencairan dan bentuk pemanfaatan dari pencairan pertama (8a). Pada poin Bimbingan Pendidikan, ini di lakukan oleh pihak Kecamatan (3b) (pembimbing PKH) di Daerah

masing-masing. Setelah itu akan ada proses Bimbingan (4b) untuk dapat memaksimalkan bantuan PKH yang diberikan (5b).

### **3.3 Evaluasi Proses.**

Pada Evaluasi Proses Model CIPP ini peneliti memfokuskan pada 2 hal yaitu proses administrasi dan pelaksanaan Program keluarga harapan yang ada di Kabupaten Lamandau tahun 2016.

#### **a. Proses Administrasi**

Proses Administrasi dimulai saat data yang diberikan pemerintah pusat melalui provinsi kepada kabupaten, data tersebut berupa nama keluarga penerima manfaat. Data tersebut akan dibagikan kepada pembimbing lapangan disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten lamandau. Data tersebut akan dilakukan verifikasi untuk menentukan bahwa keluarga tersebut benar-benar berhak menerima bantuan PKH. berikut kutipan wawancara dengan pembimbing lapangan kecamatan Delang untuk menanyakan kegiatan verifikasi mengatakan bahwa:

*“untuk di Delang ini mas sosialisasi dan verifikasi di jadikan satu, biasanya saya datang ke rumah KPM nya mas. Tapi satu hari sebelumnya saya sudah kasih undangan mas. Kalo saya mau kerumah mereka untuk sosialisasi PKH.”*

Setelah dilakukan verifikasi, tahap selajutnya yaitu validasi dan pencairan pertama dan kedua. Tugas pembimbing lapangan selanjutnya yaitu melihat komitmen dari penerima PKH dalam pemanfaatan dana yang diberikan di tahap 1 dan 2. Komitmen ini menentukan untuk dilakukannya pencairan tahap 3 dan 4. Proses administrasi untuk kecamatan delang agak

sedikit lebih susah dengan 2 kecamatan lainnya karena KPM belum semua paham dengan teknologi, jadi pembimbing lapangan lebih ekstra dalam memberikan bantuan dalam pencairan PKH. administrasi pendidikan sama persis dengan bantuan PKH pada sektor lainnya, yang menjadi perbedaan adalah bantuan tersebut di manfaatkan pada bidang pendidikan.

Komitmen untuk bantuan bidang pendidikan dilihat dari nilai sekolah anak tersebut, jadi pembimbing lapangan setiap 1 bulan sekali meminta nilai kepada sekolah anak tersebut. komitmen juga dilihat dari pemanfaatan dari dana yang di berikan untuk keperluan sekolah.

## **b. Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Lamandau dapat di katakan sesuai harapan. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata yang diwawacarai mengharapkan tahun depan mendapatkan bantuan PKH kembali. Pada bidang Pendidikan PKH sudah mengalami peningkatan, dari 538 KPM yang mendapatkan bantuan Pendidikan sekita 36 KPM. Hal ini dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.4

Keluarga Penerima Manfaat Bidang Pendidikan.

No	Kecamatan	Usia	Jumlah (anak)
1	Delang	7-12 tahun	6
		12-15 Tahun	4

		15-18 Tahun	2
2	Bulik Timur	7-12 tahun	5
		12-15 Tahun	6
		15-18 Tahun	2
3	Lamandau	7-12 tahun	5
		12-15 Tahun	4
		15-18 Tahun	2
Juumlah			36 Anak

*Data bersumber dinas Sosial Kabupaten lamandau 2016.*

Dari data diatas ada 36 Anak yang tidak mampu dan tidak ingin kesekolah karena minder. Data tersebut merupakan data tahun 2016, dapat dipahami bahwa Kecamatan Bulik Timur memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 13 anak. Dan yang paling rendah Kecamatan Lamandau ada 11 anak. Pelaksanaan PKH pendidikan di Kabupaten Lamandau berjalan semestinya, sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang ada. Perbedaannya adanya proses bimbingan yang dilakukan kordinator disetiap Kecamatan.

Pada tahun 2016 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan hanya dilaksanakan pada 3 Kecamatan dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamanda. Pada Evaluasi proses pelaksanaan peneliti merelasikan pada manfaat, tujuan, managmen, dan Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Berikut tahapan tersebut :

#### 1. Manfaat Program Keluarga Harapan.

Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan memiliki manfaat yang dirasakan oleh masyarakat (penerima bantuan), hal itu yang diharapkan Pemerintah sebagai pelaksana program PKH. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pada jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban Rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan Pokok.
- b. Pada jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan di setiap generasi melalui :
  1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan kesehatan serta pendapatan anak dimasa yang akan datang (karena pendidikan penting).
  2. Memberikan kepastian kepada anak agar dapat mempunyai pekerjaan yang layak, hal tersebut dibuktikan melalui bantuan PKH Pendidikan
- c. Untuk merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian pada bidang kesehatan serta pendidikan kepada anak.
- d. Mengurangi Pekerja Anak
- e. Mempercepat pelayanan MDGs ( melalui komponen ibu hamil, pendidikan anak, kesehatan, kesetaraan gender, dan mengurangi kematian bayi).

## 2. Tujuan Program Keluarga Harapan.

Tujuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu rumah tangga sangat miskin dalam menghadapi kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya menjadi tidak miskin melalui pendidikan dan kesehatan.
- b. Membuat peningkatan pada status kesehatan dan gizi Ibu hamil/ Nifas dan anak dibawah 6 tahun dari RTSM.

- c. Melakukan peningkatan partisipasi sekolah anak-anak (terutama SD-SMP) RTSM.
- d. Membantu meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM

Tabel 3.5

Komponen Program Keluarga Harapan.

Komponen Program Keluarga Harapan			
No	Pendidikan	Kesehatan	Kesimpulan
1	Meningkatkan kehadiran anak sekolah	Meningkatkan Kesehatan Ibu	Meningkatkan kesejahteraan sosial
2	Mengurangi pekerja anak dan anak jalanan	Meningkatkan Kesehatan anak	
3	Memperbaiki fasilitas kesehatan	Meningkatkan fasilitas Kesehatan	
4	Memperbaiki kualitas pendidikan	Meningkatkan penanganan kualitas kesehatan	

*Website Kementerian Sosial 2017*

3. Managemen Organisasi Program Keluarga Harapan.

PKH merupakan salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi penanggulangan Kemiskinan. PKH berada dibawah tim kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Pada pelaksanaannya PKH dilaksanakan oleh Kementrian sosial dengan melibatkan beberpa lembaga dan kementrian lainnya.

4. Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui beberapa tahapan, berikut ada tahapan berikut :

a. Proses Penetapan Lokasi dan Sleksi

Pada tahap pertama ini berada pada Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian sosial sebagai Penentu Penetapan Lokasi serta daftar

penerima pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pemerintah Pusat menentukan penerima PKH lalu membagikan kepada setiap Provinsi, dan kemudian Provinsi membagikan kepada setiap Kabupaten atau Kota yang memiliki daftar Penerima Manfaat PKH.

b. Pertemuan awal dan Validasi Calon Peserta PKH

Pada Tahap Kedua ini dilakukan pada tingkat Kabupaten atau kota, yang melakukan pertemuan awal dengan calon penerima bantuan PKH. Tujuan pertemuan awal tersebut adalah untuk melakukan pengecekan dan Validasi Data dari Pemerintah Pusat terhadap KPM.

c. Pencairan Pertama

Pada Tahap ketiga ini adalah tahap pencairan bagi yang sudah dilakukan lulus pengecekan dan validasi bahwa berhak menerima Bantuan. Pencairan ini tergantung oleh pemerintah Pusat, biasanya pencairan pada triwulan pertama tahun tersebut atau paling lambat pada bulan ke empat. Pencairan sendiri ada beberapa tipe. 1. Ada yang langsung masuk ke rekening penerima PKH (dibuatkan rekening). 2. ada yang diberikan langsung karena keterbatasan kemampuan (bagi lansia dan disabilitas).

d. Pembentukan Kelompok Peserta PKH

Pada tahap ke empat ini dilakukan oleh kordinator lapangan di setiap tingkat Desa. Pembentukan kelompok tersebut agar memudahkan saat penyaluran bantuan PKH pada tahapan selanjutnya.

- e. Verifikasi Komitmen peserta PKH pada Komponen Kesehatan dan Pendidikan.

Pada tahap ini hampir sama seperti pada tahap kedua, hanya saja ini pada bidang Pendidikan (SD,SMP, SMA) dan disabilitas (cacat total). Verifikasi ini dilakukan oleh kordinator lapangan dinas sosial Kabupaten di setiap desa.

- f. Penangguhan dan Pembatalan

Pada tahap ini dilakukan oleh pembimbing PKH pada setiap desa. Pembatalan dan penangguhan dilakukan karena jika penerima bantuan melanggar ketentuan dalam pelaksanaan PKH.

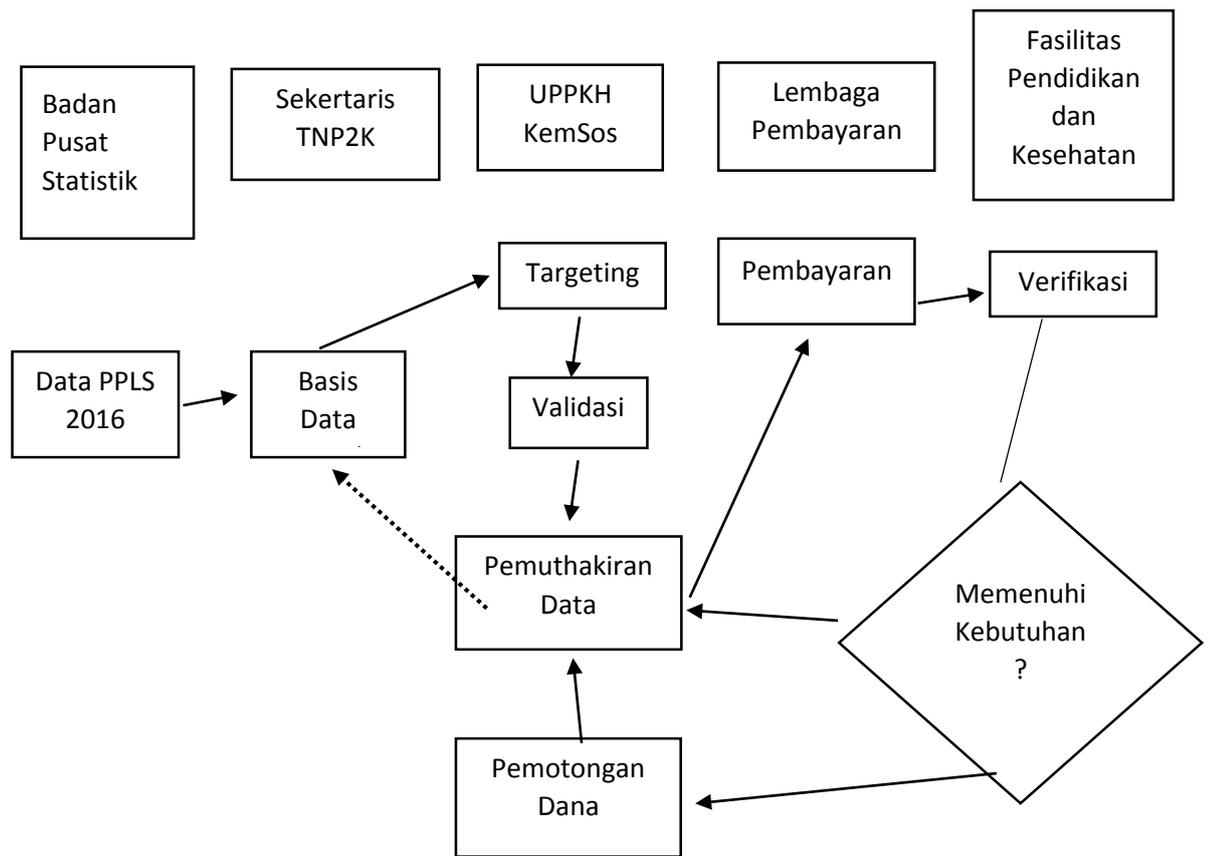
- g. Pemutakhiran data

Pada tahap ini dilakukan oleh dinas sosial (pada tingkat Kabupaten), lalu diberikan kepada Provinsi hingga akhirnya sampai ke pusat. Sehingga, pemuthakiran data akan digunakan sebagai pertimbangan pada pelaksanaan PKH pada tahun selanjutnya.

#### h. Pengaduan

Pada tahap ini dilakukan oleh penerima PKH yang merasa tidak melanggar ketentuan pelaksanaan PKH, namun mendapatkan sanksi pembatalan atau penangguhan. Berikut Proses pelaksanaan PKH digambarkan melalui Struktur dibawah: Pelaksanaan Program Keluarga Harapan juga sesuai dengan Standard

Bagan 3  
Struktur Pelaksanaan PKH.



Standard Operational Procedure (SOP). Berikut adalah beberapa SOP dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan:

a. Kordinasi Persiapan Pertemuan Awal

Adalah pertemuan persiapan awal dengan Camat, RT/RW, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pendidikan, berikut tahapannya : a. Mengupulkan permasalahan yang terjadi, b. Memperkuat komitmen dalam melaksanakan kewajiban, c. Sosialisasi, dan d. Motivasi.

Bertujuan untuk memberikan dan memperoleh informasi-informasi ataupun kendala yang lebih akurat dan terjadi tentang peserta PKH, dan memotivasi para peserta PKH serta.

Output / Keluaran adalah Adanya penguatan komitmen untuk para pengaku kepentingan yang dalam hal ini adalah peserta PKH, pendamping PKH, dan service provider. Ruang lingkup/ Kegiatan ini dilaksanakan sebagai aturan baku.pelaksanaan dilaksanakan oleh seluruh pelaksana PKH, peserta dan pendamping PKH dan service provider. Tanggung Jawab, Koordinasi ini dilakukan berjenjang seluruh elemen yang tergabung dalam PKH, Tim Uppkh daerah beserta para pendamping. Berikut prosedur pelaksanaan PKH, Pertama Tim Koordinasi Pusat menyusun jadwal untuk melakukan pertemuan awal di daerah.

Kedua, Tim Koordinasi Uppkh Kabupaten dan pendamping PKH melakukan koordinasi dengan service provider dan pemerintah setempat untuk pelaksanaan pertemuan awal. Ketiga, Para pendamping melakukan koordinasi dengan melakukan kunjungan awal ke service provider dan peserta PKH.

**b. Fungsi Pendamping**

adalah kegiatan yang dilakukan pendamping dalam memotivasi peserta PKH untuk melaksanakan kewajiban. Tujuan Pendampingan, merubah pola pikir perserta PKH dan memfasilitasi peserta PKH dalam mengakses fasilitas dasar kesehatan dan pendidikan. Ruang lingkup, Prosedur ini dilaksanakan sebagai aturan baku yang berlaku tetap,

dilaksanakan oleh para pendamping. Tanggung jawab, Pendamping bertanggung jawab terhadap perubahan pola pikir peserta PKH dikarenakan fungsi pendamping sebagai motivator, mediator dan advokasi.

Pendamping menyusun agenda kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Pendamping melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan agenda dan kegiatan lain yang bersifat kondisional. Pendamping mencatat semua temuan temuan dan permasalahan yang ada serta solusinya selama kegiatan. Kegiatan yang dilakukan dituangkan ke dalam laporan bulanan dengan dilampiri CKP (Checklist Kegiatan Pendamping). Laporan bulanan diserahkan ke UPPKH Kabupaten pada minggu pertama setiap bulannya, untuk ditindaklanjuti oleh Korwil.

c. Pertemuan Kelompok.

adalah Pertemuan berkala yang dilakukan pendamping dengan anggota kelompok RTSM setiap bulan untuk melakukan diskusi mengenai: Update/ progress data, Permasalahan yang ada dan menerima pengaduan, Komitmen serta PKH dan melakukan kewajiban, Sosialisasi perkembangan dan pencapaian program, dan Motivasi kepada anggota kelompok. Tujuan , untuk menyerap aspirasi, berbagi informasi, memutakhirkan data, dan Pertemuan Kelompok adalah meningkatnya motivasi untuk melaksanakan komitmen.

Output/ hasil : termotivasi RTSM untuk melaksanakan komitmen. Ruang lingkup, Prosedur ini dilaksanakan sebagai aturan baku yang berlaku tetap, dilaksanakan oleh seluruh pendamping PKH. Penanggung

Jawab, Penanggung Jawab Pertemuan rutin Kelompok dilakukan pendamping. Prosedur Pertemuan Kelompok. Pendamping bersama ketua kelompok menyusun agenda untuk melakukan pertemuan minimal satu bulan sekali. Pendamping melaksanakan pertemuan kelompok. Pendamping membimbing kelompok membuat daftar kehadiran peserta pertemuan kelompok. Pendamping memutakhirkan data status RTSM.. Pendamping menggali aspirasi, permasalahan, dan menerima pengaduan dari peserta PKH.

Pendamping menerima laporan dari ketua kelompok tentang kondisi anggota kelompok. Pendamping mengingatkan kepada peserta PKH untuk tetap komitmen menjalankan kewajibannya, agar tidak terkena sanksi. Pendamping menginformasikan jadwal pembayaran bantuan kepada peserta PKH. Pendamping membuat notulasi pertemuan sebagai bahan laporan bulanan yang akan dilaporkan ke UPPKH Kabupaten/kota.

**d. Kegiatan Pendamping**

Adalah kegiatan yang dilakukan pendamping mulai dari persiapan program hingga pendamping rutin, yang meliputi : Pertemuan awal, Pertemuan dengan kelompok, Kunjungan ke layanan pendidikan dan kesehatan, Koordinasi dengan instansi terkait, Home visit ke rumah RTSM, Distribusi formulir Verifikasi, Mendampingi proses pembayaran, Melakukan Konsolidasi, Melakukan Rekonsiliasi, Memfasilitasi pengaduan-pengaduan (Membuat laporan mencairan,

laporan bulanan, dan laporan) tahunan, Mengikuti Bimtek dan rakor, Melakukan kegiatan selain kegiatan rutin yang diinstruksikan dari UPPKH Pusat maupun Kabupaten (bersifat kondisional).

Tujuan, membantu peserta PKH dalam mendapatkan hak dan mendampingi mereka untuk melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup, Prosedur ini dilaksanakan sebagai aturan baku yang berlaku tetap, dilaksanakan oleh seluruh kabupaten pelaksana PKH. Output / hasil : adanya perubahan pola pikir, adanya pembaharuan data dari peserta PKH dan solusi dari permasalahan yang ada. Tanggung Jawab, Pendamping merupakan elemen penting dan ujung tombak bagi kesuksesan program karena itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu kunci keberhasilan program. Kegiatan pendamping ini akan dituangkan di CKP (Checklist Kegiatan Pendamping) setiap minggunya.

Prosedur Kegiatan Pendamping menyusun agenda kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Pendamping melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan agenda dan kegiatan lain yang bersifat kondisional. Pendamping mencatat semua temuan temuan dan permasalahan yang ada serta solusinya selama kegiatan. Kegiatan yang dilakukan dituangkan ke dalam laporan bulanan dengan dilampiri CKP (Checklist Kegiatan Pendamping). Laporan bulanan diserahkan ke UPPKH Kabupaten pada minggu pertama setiap bulannya, untuk ditindak lanjuti oleh Korwil.

Berikut jumlah bantuan PKH yang diberikan kepada KPM di daerah Indonesia sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Besarnya Bantuan PKH.

NO	Wilayah	Besarnya Bantuan	Keterangan
1	Seluruh Indonesia	Rp. 1.890.000	Bantuan ini di berikan pada 4 tahap. Tahap pertama Rp.500.00, tahap kedua Rp 500.000, tahap ketiga Rp 500.000 dan tahap ke empat Rp. 390.000
2	Papua/ Papua Barat, Disabilitas dan Lansia	Rp.2.000.000	Bantuan ini di berikan pada 4 tahap. Tahap pertama Rp.500.00, tahap kedua Rp 500.000, tahap ketiga Rp 500.000 dan tahap ke empat Rp. 500.000

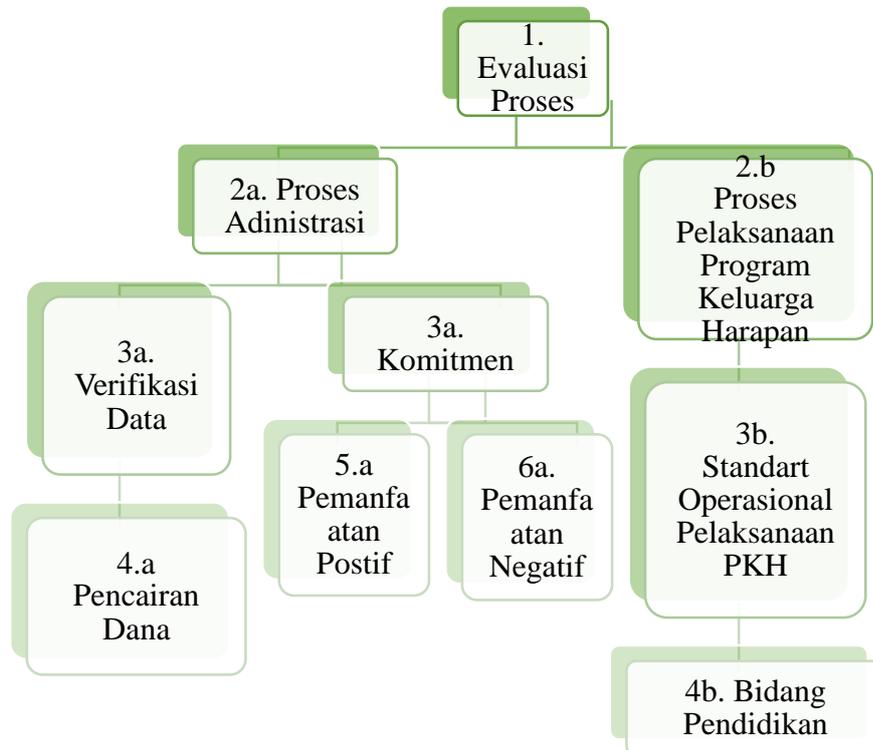
*Tabel bersumber Dinas Sosial Kab Lamandau 2016*

Perbedaan jumlah bantuan ini karena wilayah papua memiliki harga kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Serta, pada disabilitas dan lansia adalah bantuan pemerintah untuk agar bisa memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari, jumlah bantuan yang besar dimaksudkan karena kekurangan baik fisik dan faktor usia

Peneliti membuat bagan analisis yang bertujuan untuk menyimpulkan pembahasan mengenai evaluasi Proses.

Bagan 3.3  
Evaluasi Proses



Cara membaca/ memahami Pada bagan evaluasi proses (1) peneliti menjelaskannya sebagai berikut. Evaluasi proses memiliki 2 poin utama

yaitu Proses Administrasi (2a) , dan Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2b), pada poin proses administrasi yaitu dilakukan verifikasi data (3a) yang didapatkan daerah dari pusat (Kementerian Sosial RI). Setelah itu dilakukan pencairan dana (4a) (pertama), lalu dilakukan komitmen untuk melihat penggunaan dana secara positif (5a) (sesuai ketentuan) atau Negatif (6a) (tidak sesuai ketentuan). Pada poin kedua yaitu Proses Pelaksanaan PKH, dilakukan sesuai Standard Operasional Pelaksana (3b) (SOP) Program Keluarga Harapan pada Bidang pendidikan (4b).

### **3.4 Evaluasi Product.**

Evaluasi hasil (product) ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan pada keseluruhan dampak dari suatu program terhadap RTSM/ KSM. Namun, peneliti memfokuskan pada 2 hal yaitu peningkatan status pendidikan dan peningkatan angka melek huruf.

#### **a. Peningkatan status pendidikan.**

Hasil dari pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Lamandau mengalami dampak yang baik dalam hal peningkatan status pendidikan. Hal diketahui dari kutipan wawancara dengan kepala seksi (kasi) PKH mengatakan bahwa:

*“PKH ini mas benar membantu, dilapangan itu ada yang gak sekolah karena biaya. Sekarang sudah bisa sekolah. Malah di lamandau itu mas dia dapat bantuan PKH dari SMP sampai SMA, sekarang sudah kuliah setelah lulus malah sekarang jadi pembimbing PKH di daerahnya”.*

Pelaksanaan PKH merubah kehidupan orang yang menerima melalui pendidikan. Ada pula kutipan wawancara bersama pembimbing lapangan bulik timur mengatakan bahwa.

*“ada nama nya sito dia penerima bantuan PKH pendidikan, dia masih SD, dulu gak bisa baca tulik sekarang sudah bisa. Malah orang tuanya diajari sama dia. Semoga tahun depan PKH khususnya bidang pendidikan di tingkatkan mas”.*

Pelaksanaan PKH pendidikan ini tidak dapat langsung dilihat hasilnya. Hal ini dikarenakan pendidikan perlu waktu, peran penting dilakukan pembimbing lapangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan PKH pendidikan agar sesuai dengan tujuan PKH yaitu memutus rantai kemiskinan. Tujuan Pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui PKH dirasa sudah sesuai, karena pendidikan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Peneliti menyimpulkan beberapa hasil wawancara yang mengatakan bahwa PKH ini membuat keluarga tersebut bisa menyekolahkan anaknya. Sehingga diharapkan PKH tahun selanjutnya memiliki peningkatan agar dampak pada Pendidikan juga meningkat.

#### **b. Peningkatan Angka Melek Huruf.**

Pada Kabupaten Lamandau Angka Melek huruf tahun 2015 sampai 2016 mengalaih penurunan, namun ini di lihat dalam lingkup provinsi (setiap Kabupaten). Berikut data angka melek huruf setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.7

Angka Melek dan Buta Huruf Kalimantan Tengah.

Semua Kabupaten	Laki-Laki+Perempuan	
	Melek Huruf Perdesaan dan Kota	Buta Huruf Perdesaan dan Kota
	2016 (%)	2016 (%)
Kalimantan Tengah	96.87	3.13
Kab. Kotawaringin Barat	95.43	4.57
Kab. Kotawaringin Timur	96.93	3.07
Kab. Kapuas	95.50	4.50
Kab. Barito Selatan	98.41	1.59
Kab. Barito Utara	96.01	3.99
Kab. Sukamara	92.99	7.01
<b>Kab. Lamandau</b>	<b>93.76</b>	<b>6.24</b>
Kab. Seruyan	96.31	3.69
Kab. Katingan	98.44	1.56
Kab. Pulang Pisau	97.88	2.12
Kab. Gunung Mas	99.49	0.51
Kab. Barito Timur	98.28	1.72
Kab. Murung Raya	98.29	1.71

Kota Palangka Raya	94.20	5.80
--------------------	-------	------

*Badan pusat statistik Kabupaten Lamandau 2016*

Data tersebut adalah jumlah dari laki-laki dan wanita, dapat dipahami bahwa Kabupaten Lamandau pada tahun 2016 presentase angka melek hurufnya yaitu 93,76%. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Lamandau menjadi peringkat 13 dari 14 kabupaten dan Kota yang ada diseluruh Kalimantan Tengah. Serta Kabupaten Lamandau juga memiliki angka buta huruf sebesar 6.24%. peringkat angka buta hurufnya ada di 13 dari 14 kabupaten kota. Sedangkan yang paling tinggi angka buta hurufnya adalah Kabupaten Sukamara. Dari angka melek huruf Kabupaten Lamandau masih dapat dikatakan kurang baik dalam hal peningkatan status Pendidikan.

Angka melek huruf mengalami penurunan dapat dimaklumi karena PKH pendidikan hanya memiliki 36 KPM dan pelaksanaan PKH tahun 2016 hanya pada 3 Kecamatan. Namun ada kutipan wawancara dari pembimbing lapangan Kec Lamandau mengatakan bahwa :

*“angka melek huruf di Kec lamandau meningkat mas, ada beberapa anak penerima PKH yang awalnya gak bisa baca dan tulik sekarang sudah lumayan bisa. Setiap sabtu saya kumpulkan dibalai desa untuk tes, sekalian lihat perkembangan nya mas”.*

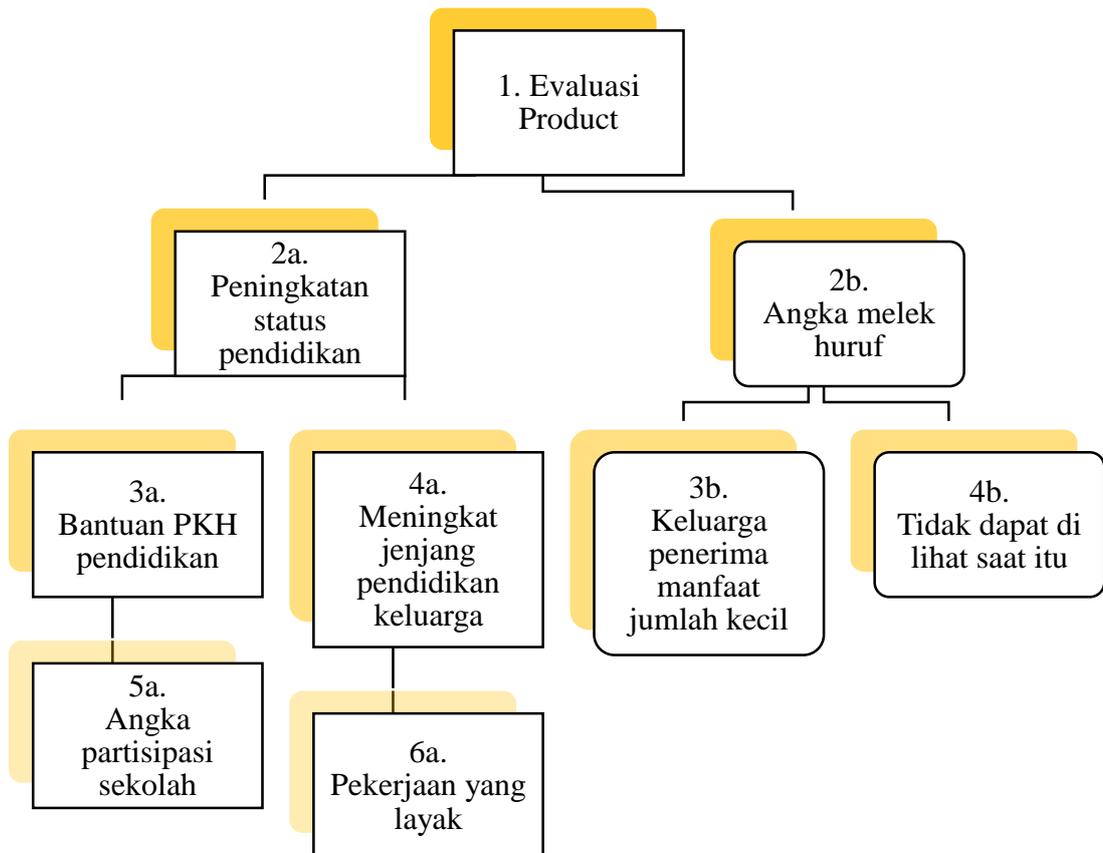
Pernyataan tersebut sudah menjelaskan bahwa PKH sebenarnya sudah berdampak pada angka melek huruf. Namun, jumlahnya tidak begitu besar karena jumlah KPM yang juga masih sedikit. Peneliti mendapatkan informasi dari Kasi (Kepala Seksi) PKH yang mengatakan bahwa :

*“untuk tahun 2018 nanti mas PKH di laksanakan di semua kecamatan di kabupaten Lamandau. Sehingga harapan kami di daerah adanya peningkatan angka melek huruf dan status pendidikan di daerah”.*

Peneliti menyimpulkan pada sub angka melek huruf, bahwasanya bantuan PKH di Kabupaten lamandau sangat berdampak pada angka melek huruf. Namun, hanya jumlahnya saja yang kecil sehingga bila dipresentasikan tidak dapat dilihat melauai angka.

Peneliti membuat bagan analisis yang bertujuan untuk menyimpulkan pembahasan mengenai evaluasi Product.

Bagan 3.4  
Evaluasi Product.



Pada bagan Evaluasi Proses memiliki 2 poin utama yaitu Peningkatan Status Pendidikan (2a) dan Angka Melek huruf (2b). Pada poin peningkatan status pendidikan (4a) melalui bantuan PKH (3a) yang diberikan sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah (5a). Hal itu menjadikan adanya peningkatan pada jenjang pendidikan keluarga, sehingga outputnya adalah pekerjaan yang layak (6a). Pada poin angka melek huruf di pengaruhi oleh para Keluarga penerima manfaat (3b) (KPM) yang di Kabupaten Lamandau masih sedikit, maka dari itu dampak yang dirasakan tidak dapat terlihat langsung, namun Angka Melek huruf (4b) tetap mengalami peningkatan setelah pelaksanaan PKH.